

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"  
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

## Implementasi Percepatan *Open Defecation Free* (ODF) Di Kelurahan Lebakgede Kota Bandung

Maya Novita Sari

<sup>a</sup> Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : maya21480@gmail.com

### Abstrak

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) pada aliran sungai akan berdampak pada tingkat pencemaran sungai dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut maka perlu adanya percepatan *Open Defecation Free* (ODF) untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terhindar dari penyakit berbahaya akibat pencemaran tinja pada aliran sungai. Tulisan ini akan menganalisis implementasi percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi dan studi dokumen. Hambatan percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Lebakgede yaitu belum adanya tim percepatan *Open Defecation Free* (ODF), masalah pendanaan, keterbatasan lahan dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi kendala dalam pembangunan *septic tank*; dan belum adanya keterlibatan pihak swasta dan akademisi. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan di dapat beberapa solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan pembentukan tim percepatan *Open Defecation Free* (ODF) tingkat Kelurahan Lebakgede dengan Surat Keputusan Lurah; *collaborative governance*. Pemerintah Kota Bandung perlu membentuk peraturan tentang Lokasi Fokus Intervensi percepatan 100% *Open Defecation Free* (ODF).

**Kata Kunci:** implementasi, ODF, *collaborative governance*

## *Implementation Of Open Defecation Free (ODF) Acceleration In Lebakgede Village Bandung City*

### Abstract

*The behavior of open defecation (BABS) in river flows will have an impact on the level of river pollution and ultimately affect the quality of public health. Following up on this, it is necessary to accelerate the Open Defecation Free (ODF) to create a healthy community and avoid dangerous diseases due to fecal contamination in river flows. This paper will analyze the implementation of Open Defecation Free (ODF) acceleration in Lebakgede Village, Coblong District, Bandung City by using the Van Meter Van Horn policy implementation model. This research uses descriptive qualitative research method with data collection through observation and document study. Barriers to the acceleration of Open Defecation Free (ODF) in Lebakgede Village, namely the absence of an Open Defecation Free (ODF) acceleration team, funding problems, limited land and community economic conditions are obstacles in the construction of septic tanks; and the absence of involvement of the private sector and academia. Based on the results of the analysis carried out, several solutions were found to solve the existing problems, namely the formation of an Open Defecation Free (ODF) acceleration team at the Lebakgede Village level with a Lurah Decree; collaborative governance. The Bandung City Government needs to form a regulation on the Location of Focused Interventions to accelerate 100% Open Defecation Free (ODF).*

**Keywords :** implementation, ODF, *collaborative governance*

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

## A. PENDAHULUAN

Isu sanitasi menjadi perhatian global dan merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 2030 poin keenam yaitu akses air bersih dan sanitasi yang bertujuan untuk memberikan jaminan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sanitasi yang buruk memberikan dampak negatif bagi aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Hampir 70 persen dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang telah diuji di Indonesia tercemar limbah tinja dan turut menyebabkan penyakit diare yang merupakan penyebab utama kematian balita (UNICEF, 2022). Upaya Pemerintah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Stop Buang Air Besar Sembarangan merupakan pilar pertama STBM yang dapat diwujudkan dengan membudayakan perilaku buang air besar yang sehat sehingga dapat memutus alur kontaminasi tinja sebagai sumber penyakit serta melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana buang air besar yang sesuai dengan standar kesehatan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang menghadapi masalah sanitasi. Berdasarkan data pada <http://monev.stbm.kemkes.go.id> Kota Bandung menduduki peringkat 5 terbawah dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Capaian *Open Defecation Free* (ODF) Kota Bandung berada pada angka 69.01%.. Berdasarkan pernyataan Ketua Forum Bandung Sehat (FBS), Siti Muntamah pada 27 Februari 2020 dalam REPUBLIKA, bahwa "kurang lebih 200 ribu kepala keluarga di Kota Bandung BAB sembarangan. Setiap harinya setiap orang membuang tinja sekitar 200-300 gram, dan jika dihitung terdapat 5 ton tinja per

hari yang dibuang ke selokan ataupun sungai yang dapat mencemari lingkungan" (Ridwan, 2020). Hal tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak.

Komitmen pemerintah Kota Bandung terkait masalah ini yaitu adanya deklarasi *Open Defecation Free* (ODF). Adanya berbagai program yang dicanangkan bersama Forum Bandung Sehat (FBS) yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Adanya prioritas anggaran untuk percepatan *Open Defecation Free* (ODF) dari anggaran Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) dan piagam pelangi untuk mendorong kewilayahan agar lebih bersemangat dalam percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di wilayah masing-masing.

Pada tahun 2021 terdapat 93 kelurahan dari 151 kelurahan yang tersebar di 30 kecamatan di Kota Bandung yang telah mencapai 100% *Open Defecation Free* (ODF). Tersisa 58 kelurahan yang sampai saat ini masih berjuang menuju 100% *Open Defecation Free* (ODF). Hambatan percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kota Bandung diantaranya yaitu adanya tantangan fisik, tantangan ekonomi, tantangan sosial, tantangan kelembagaan, dan tantangan finansial. (Tarlani et al., 2021)

Kelurahan Lebakgede merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Coblong yang menghadapi nasakah sanitasi. Berdasarkan piagam sanitasi yang diterima selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Kelurahan Lebakgede mendapatkan piagam merah sanitasi yaitu tingkat akses sanitasi di bawah 30%. Pada tahun 2019 dilansir dari <http://monev.stbm.kemkes.go.id> presentase capaian akses sanitasi di Kelurahan Lebakgede berada pada angka 6.48%, terendah dari 6 kelurahan di Kecamatan Coblong.

Pelaksanaan percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Lebakgede telah melibatkan beberapa pihak dan telah dilaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian *Open Defecation Free* (ODF), namun upaya yang telah dilaksanakan belum mendapatkan hasil yang optimal. Berdasarkan permasalahan yang ada

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

maka penulis akan mengalisis implementasi percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Lebakgede dengan model implementasi kebijakan berdasarkan teori Van Meter Van Horn.

## B. PEMBAHASAN

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) masyarakat di Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung disebabkan oleh rendahnya kepemilikan jamban sehat karena keterbatasan ekonomi dan ketersediaan lahan untuk pembangunan *septic tank*, serta rendahnya pengetahuan resiko kesehatan masyarakat akibat sanitasi yang buruk. Adanya aliran sungai yang melintasi pemukiman warga juga menjadi salah satu faktor pendukung adanya perilaku buang air besar masyarakat ke aliran sungai baik secara langsung ataupun melalui pipa-pipa yang disalurkan dari rumah warga. Kelurahan Lebakgede dilintasi sungai Cilebaklarang yang merupakan anak sungai Cikapundung. Sungai ini melintasi enam RW diantaranya RW 01, RW 04, RW 12, RW 13, RW 14 dan RW 15.

Implementasi percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung dapat di deskripsikan dengan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, sebagai berikut :

### 1. Standar dan tujuan kebijakan

Regulasi terkait percepatan pencapaian kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) diantaranya yaitu :

- 1) Perwal Nomor 046 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Limbah Air Limbah;
- 2) Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
- 4) Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.5/428-Bappelitbang/2021 tentang satuan tugas percepatan kelurahan ODF.

Standar yang digunakan dalam pelaksanaan percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Lebakgede mengacu pada regulasi tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaanya

Kelurahan Lebakgede belum memiliki Surat Keputusan Lurah tentang tim percepatan *Open Defecation Free* (ODF) tingkat Kelurahan Lebakgede.

### 2. Sumber daya

Pelaksanaan percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Lebakgede berjalan kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan capaian *Open Defecation Free* (ODF) selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang masih berada dibawah angka 50%.

*Stakholder* yang telah terlibat dalam upaya percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Lebakgede yaitu Pemerintah Kelurahan Lebakgede, Puskesmas Sekeloa, BKM Madani, RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan *Open Defecation Free* (ODF) diantaranya yaitu pembangunan *saptic tank* komunal di beberapa titik oleh Pemerintah Kelurahan dan BKM Madani, serta Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Puskesmas Sekeloa.

Sumber pendanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Lebakgede berasal dari dana Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan, Program Kotaku (BKM Madani), dan Puskesmas Sekeloa. Keterbatasan anggarann menjadi kendala dalam pembangunan *septic tank* di Kelurahan Lebakgede. Terlebih adanya pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap prioritas anggaran pembangunan. Diperlukan keterlibatan pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung pendanaan pembangunan *septic tank* di wilayah Kelurahan Lebakgede.

Di wilayah Kelurahan Lebakgede terdapat banyak perusahaan dan perguruan tinggi yang sampai saat ini belum berpartisipasi dalam percepatan *Open Defecation Free* (ODF). Potensi ini dapat menunjang percepatan *Open Defecation Free* (ODF) apabila dikelola dengan maksimal.

### 3. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antar organisasi telah terjalin akan tetapi kurang *intens* untuk mengkomunikasikan pendataan/pemetaan akses sanitasi serta strategi jangka pendek dan jangka panjang



PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

percepatan *Open Defecation Free* (ODF). Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* maka perlu dibentuk Tim Khusus Percepatan *Open Defecation Free* (ODF) tingkat Kelurahan.

#### 4. Karakteristik organisasi pelaksana

Ikatan antar *stakeholder* dalam percepatan *Open Defecation Free* (ODF) pada tingkat Kelurahan Lebakgede belum berjalan dengan baik. Demikian juga hubungan dengan instansi yang lebih tinggi yang tergabung dalam satuan tugas percepatan kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) belum intensif untuk mendapatkan arahan, perhatian dan kontrol dari setiap kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat kelurahan.

#### 5. Disposisi

Sosialisasi dan himbauan larangan buang air besar sembarangan sesuai Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat telah dilaksanakan dengan surat edaran dan sosialisasi kepada RT/RW. Namun pengawasan dan penegakan aturan tersebut belum terlaksana maksimal sehingga masyarakat masih mengalirkan tinja ke selokan/sungai.

Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, telah dilaksanakan oleh Puskesmas Sekeloa secara berkala di setiap RW. Namun kesadaran masyarakat untuk membuat *septic tank* mandiri masih sangat kurang.

#### 6. Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan politik

Pembangunan *septic tank* di Kelurahan Lebakgede terkendala keterbatasan lahan karena perumahan yang padat dan kondisi wilayah yang berundak. Melihat kondisi tersebut perlu adanya pemetaan akses sanitasi yang melibatkan puskesmas, RT RW, kader posyandu, para akademisi dan komunitas masyarakat sehingga dapat ditetapkan lokasi, kebutuhan *septic tank*, daya tampung dan pilihan solusi sistem pembangunan *septic tank* yang mungkin dapat dibangun sesuai kondisi wilayah.

Pemicuan STBM dan sosialisasi *Open Defecation Free* (ODF) yang telah dilakukan belum mampu memberikan hasil yang signifikan dalam merangsang masyarakat untuk membangun *septic tank*. Kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas berada pada ekonomi menengah kebawah membuat masyarakat merasa enggan untuk membangun *septic tank* individu atau sekedar menyalurkan pipa jamban ke *septic tank* komunal karena memerlukan biaya yang tidak sedikit.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Hambatan dalam implementasi percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Lebakgede yaitu :

1. Belum ada Tim Percepatan *Open Defecation Free* (ODF) sebagai wadah komunikasi antar *stakeholder*;
2. Pembangunan *septic tank* komunal terkendala pendanaan dan keterbatasan lahan;
3. Kondisi ekonomi masyarakat masyarakat enggan membangun septik tank mandiri atau menyalurkan ke saluran air kotor;
4. Belum ada keterlibatan pihak swasta dan akademisi.

Dalam rangka mewujudkan percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Lebakgede Kota Bandung, maka berikut rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Percepatan *Open Defecation Free* (ODF) tingkat Kelurahan lebakgede dengan Surat Keputusan Lurah Lebakgede.
2. Masalah pemetaan akses sanitasi, penelitian kualitas lingkungan, perencanaan lokasi dan jenis *septic tank* yang dapat dibangun, serta masalah pendanaan akan dapat dipecahkan dengan adanya *collaborative governance*.
3. Pemerintah Kota Bandung perlu membentuk peraturan tentang Lokasi Fokus Intervensi percepatan 100% *Open Defecation Free* (ODF). Dengan adanya peraturan ini Pemerintah Daerah akan lebih fokus dalam menangani Kelurahan-Kelurahan yang capaian *Open Defecation Free* (ODF) nya masih rendah dan merangsang aktor-aktor di kewilayahan untuk berinovasi mencari

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

solusi untuk mencapai 100% *Open Defecation Free* (ODF). Melalui kebijakan ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk aktif mengusulkan program/kegiatan terkait peningkatan akses sanitasi melalui musrenbang, PIPPK, DAU dan akses pembiayaan lainnya.

## REFERENSI

- Dinas Kesehatan Kota Bandung. (2020). *Profil Kesehatan Kota Bandung 2020*. Dinas Kesehatan Kota Bandung. [www.dinkes.bandung.go.id](http://www.dinkes.bandung.go.id)
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia 2017* (Vol. 1227, Issue July). <https://doi.org/10.1002/qj>
- Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.5/428-Bappelitbang/2021 tentang satuan tugas percepatan kelurahan ODF, (2021).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. (2014).
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, (2019).
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah, (2020).
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 046 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Limbah Air Limbah, (2018).
- Ridwan, M. F. (2020). *Tiap Hari 5 Ton Tinja Manusia di Bandung Dibuang ke Sungai*. *Republika Online*. REPUBLIKA. <https://www.republika.co.id/berita/q6clm3396/tiap-hari-5-ton-tinja-manusia-di-bandung-dibuang-ke-sungai>
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 100/SE-029-Bag.Pem tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Prioritas Kota Bandung Tahun 2021 di Wilayah, (2021).
- Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 440/SE.050-Dinkes Tahun 2017 tentang Upaya Percepatan Kelurahan ODF, (2017).
- Tarlani, Damayanti, V., & Ekasari, A. M. (2021). Integrative Solutions for the Acceleration of Open Defecation Free (ODF) in Bandung City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 830(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/830/1/012086>
- UNICEF. (2022). *Indonesia Hampir 70 persen sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-hampir-70-persen-sumber-air-minum-rumah-tangga-tercemar-limbah-tinja>